

**PENGUMUMAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MOKHAMAD YASIN  
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH  
3. NHK : 634891

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.150.000.000

- Tanah Seluas 2.382 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah Seluas 962 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/400 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 800.000.000
- Tanah Seluas 2.170 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 175.000.000

- MOBIL, HONDA HR-V 1.5 S CVT A/T SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 58.650.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 236.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.619.650.000

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 3.619.650.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.